

---

## DARI PARTISIPASI KE AKSI: MENCIPTAKAN KOLABORASI BERKELANJUTAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Verawati Skaut

Universitas Timor, Timor Tengah Utara, Indonesia

Email: [skautverawati@gmail.com](mailto:skautverawati@gmail.com)

### Abstrak

Partisipasi masyarakat kini memegang peranan krusial dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, mencerminkan tren global peningkatan keterlibatan publik dalam isu-isu penting. Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan merupakan fondasi penting dalam negara demokrasi, dimana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kebijakan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah, dengan penekanan pada pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Sumber data secara sistematis diklasifikasikan ke dalam data sekunder yang bersumber dari kumpulan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata dapat dilakukan dengan mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah melalui kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan bukan hanya masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan kontribusi tambahan dalam menciptakan solusi yang inovatif dan efektif.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Kolaborasi, Berkelanjutan, Masyarakat, Pemerintah.

### Abstract

*Public participation plays a crucial role in governance and decision-making processes, reflecting the global trend of increasing public involvement in important issues. Public participation in governance is a crucial foundation of a democratic state, where collaboration between the public and government can increase the effectiveness of public policies, accountability, and public trust. This study aims to explore the mechanisms that lead to sustainable collaboration between the public and government, with an emphasis on shifting from symbolic participation to concrete action. This study uses a descriptive qualitative methodology. Data sources are systematically classified into secondary data sourced from the literature. Data collection techniques are conducted through library research. The results of the study indicate that the shift from symbolic participation to concrete action can be achieved through mechanisms that lead to sustainable collaboration between the public and government through multi-stakeholder collaboration, involving not only the public and government, but also the private sector and non-governmental organizations that can provide additional contributions in creating innovative and effective solutions.*

**Keywords:** Participation, Collaboration, Sustainable, Public, Government.

## A. PENDAHULUAN

Partisipasi di Indonesia muncul dari hasil perjalanan panjang yang berevolusi dari budaya gotong royong tradisional hingga partisipasi politik modern yang dijamin undang-undang. Secara formal partisipasi public mulai berkembang pesat pasca kemerdekaan dan mengalami transformasi signifikansi para era Reformasi. Partisipasi masyarakat kini memegang peranan krusial dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, mencerminkan tren global peningkatan keterlibatan publik dalam isu-isu penting. Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan merupakan fondasi penting dalam negara demokrasi, dimana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kebijakan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (Kusuma, 2025).

Kolaborasi antara Masyarakat dan pemerintah (*collaborative governance*) telah terbukti efektif dalam meningkatkan efektivitas layanan publik di berbagai negara, terutama dalam konteks kota besar dan wilayah dengan kapasitas kelembagaan yang relatif tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi multisektor dapat memperkuat akuntabilitas dan memperluas cakupan pelayanan public (El-Jardali et al., 2024). Partisipasi publik merupakan pilar utama dalam demokrasi modern yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Melalui partisipasi, demokrasi bukan hanya berbicara mengenai perwakilan, tetapi juga tentang suara rakyat yang nyata dalam pengelolaan negara. Partisipasi publik menjadi tenaga baru yang memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (Nurhaliza, 2025). Pergeseran paradigma dari pendekatan *top-down* menuju pemerintahan kolaboratif semakin mengukuhkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Masyarakat (Rustiyana et al., 2025).

Namun, mewujudkan kolaborasi bukan tanpa tantangan. Kurangnya kepercayaan Masyarakat dan pemerintah, perbedaan kepentingan yang sulit diselaraskan, kapasitas sumber daya yang kurang memadai, serta hambatan komunikasi dalam proses kolaborasi merupakan beberapa permasalahan yang sering muncul (Mozin et al., 2025). Selain itu, implementasi partisipasi masyarakat yang efektif juga seringkali terhambat oleh kurangnya keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat, ketidaksesuaian harapan, serta kendala dalam mewujudkan aksi nyata (BPJIID UMA, 2025). Di Indonesia, tantangan ini muncul dengan minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung kolaborasi (Mozin et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak begitu aktif dalam membentuk kebijakan dibandingkan dengan daerah lain, yang disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman politik masyarakat umum sehingga hanya sedikit orang yang terlibat karena tidak menganggap pendapat mereka penting dalam hal penetapan kebijakan. Selain itu, minimnya sosialisasi pendidikan politik menyebabkan kurangnya kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan. Masyarakat di daerah pedesaan terkadang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah karena tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses informasi tentang kebijakan. Fakta bahwa masyarakat tidak memiliki literasi politik untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perdebatan kebijakan memperburuk masalah ini. Tantangan ini juga berlanjut dengan maraknya korupsi dan politik identitas dalam sistem politik kita. Demokrasi partisipatif rentan terhadap korupsi karena bergantung pada keterbukaan dan akuntabilitas setiap orang. Meskipun digunakan sebagai taktik untuk memengaruhi pemilih, politik identitas berisiko menempatkan komunitas tertindas pada posisi defensif dan mengabaikan kepentingan mereka yang sah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi dan menemukan solusi untuk mengoptimalkan dampak partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dalam lingkup penelitian ini, sumber data secara sistematis diklasifikasikan ke dalam data sekunder yang bersumber dari kumpulan literatur yang ada seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang relevan dengan topik Dari Partisipasi ke Aksi: Menciptakan Kolaborasi Berkelanjutan Antara Masyarakat dan Pemerintah. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teori, membantu proses interpretasi dan membandingkan hasil analisis dengan penelitian terdahulu. Bentuk data yang digunakan bersifat tekstual dan linguistik, meliputi kalimat, paragraph serta kutipan yang terdapat dalam pidato. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah bagian literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan untuk memperkuat analisis wacana dan menempatkan temuan penelitian dalam konteks akademik Ilmu Pemerintahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah (*collaborative governance*), merupakan pendekatan di mana aktor negara dan non-negara terlibat secara bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, hingga implementasi kebijakan publik. *Collaborative governance* terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik melalui partisipasi aktif (Fonataba, 2025). Pengelolaan air bersih dan infrastruktur di Merauke merupakan salah satu studi kasus lain bahwa perbedaan pendekatan antara kebijakan formal pemerintah dan kebutuhan nyata di lapangan. Kolaborasi sering terhambat karena kurangnya kepercayaan sosial (*social trust*) dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat lokal (Fonataba, 2025). Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi, yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama (Manganti, 2023). Partisipasi aktif warga negara dalam proses kebijakan tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan responsif (Mozin et al., 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah, dengan penekanan pada pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata. Salah satu studi identifikasi factor penyebab rendahnya partisipasi bahwa rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) disebabkan Masyarakat sering kali tidak memahami teknis perencanaan, sehingga sulit memberikan masukan yang berkualitas. Selain itu, mereka menjadi apatis karena merasa usulan mereka jarang direalisasikan atau berbeda dengan prioritas elit desa/pemerintah, serta pengalaman masa lalu di mana aspirasi tidak ditindaklanjuti yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah (Fauzi et al., 2025). Partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses kebijakan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan perbedaan prioritas antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi upaya kolaborasi yang berkelanjutan.

Pendidikan politik dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara dan juga membantu individu memahami cara kerja pemerintahan dan sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara mengambil bagian dalam proses keputusan politik (Latifa, 2023). Selanjutnya, Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri (Admin, 2025). Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengambilan keputusan desa, penting untuk menerapkan pendidikan partisipatif. Melalui pendekatan ini, masyarakat Desa Sawangan dapat memahami dan menghargai pentingnya peran mereka dalam pembangunan desa. Masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan

Keputusan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakatnya untuk masa depan yang lebih baik (PuskoMedia Indonesia, 2024).

Pendidikan dan pengembangan kapasitas komunitas memiliki peranan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan mendapatkan pendidikan politik, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pemerintahan dan sistem politik, termasuk hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Melalui pelatihan yang difokuskan pada pemahaman proses pemerintahan, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik serta berperan dalam kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat menghadirkan berbagai sudut pandang dan pengalaman yang sangat penting, sehingga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Di samping itu, kehadiran tenaga pendukung dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Organisasi non-pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mendeteksi isu-isu penting bagi masyarakat dan menggalang dukungan publik, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kerja sama semacam ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan yang penting dalam proses pembuatan kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang tepat sangat penting dalam memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Mekanisme yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, pentingnya pendidikan dan kapasitas pengembangan bagi Masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang proses pemerintahan sehingga masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Selain itu, tenaga pendukung yang berasal dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan.

Kedua, penerapan teknologi informasi dalam kolaborasi menjadi elemen yang sangat signifikan. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke informasi dan memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah. Dalam konteks ini, platform digital yang memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide, seperti forum online dan aplikasi mobile, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara real-time, serta mendengarkan masukan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Ketiga, keberlanjutan kolaborasi sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah seperti laporan berkala tentang hasil kolaborasi dan tindak lanjut dari rekomendasi masyarakat dapat memperkuat upaya kolaboratif dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa setiap daerah memiliki konteks dan dinamika sosial yang berbeda. Oleh karena itu, model kolaborasi yang dikembangkan harus memperhatikan keberagaman ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi tentang pentingnya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, di mana tiap daerah perlu mengadaptasi strategi kolaborasi berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata dapat dilakukan dengan mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah melalui kolaborasi *multi-stakeholder*.

#### D. KESIMPULAN

Model kolaborasi yang berkelanjutan yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan kolaborasi *multi-stakeholder*. Hal ini melibatkan bukan hanya masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan kontribusi tambahan dalam menciptakan solusi yang inovatif dan efektif. Kolaborasi semacam ini membuka ruang untuk berbagi sumber daya, informasi, dan ide, serta mengurangi risiko konflik kepentingan yang dapat muncul jika hanya satu pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti tidak hanya bagi pengembangan teori kolaborasi dan partisipasi, tetapi juga bagi praktik nyata di lapangan. Penelitian ini memberikan panduan yang jelas bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk memasuki fase aksi yang nyata setelah proses partisipasi, dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPJIID UMA. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Konsep, Bentuk, dan Tantangan*. Diakses dari: <https://bpjiid.uma.ac.id/2025/03/05/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-konsep-bentuk-dan-tantangan/>
- Desa Cipatujah. (2025). *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan dan Pelatihan: Membangun Kapasitas dan Keterampilan*. Diakses dari: <https://www.cipatujah-tasikmalaya.desa.id/meningkatkan-partisipasi-masyarakat-melalui-pendidikan-dan-pelatihan-membangun-kapasitas-dan-keterampilan/>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395. <https://doi.org/10.63822/vmthgf73>
- Kusuma, F. K. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Era Desentralisasi. *Media Bina Ilmiah*, 18(9), 2505-2514.
- Latifa, M. (2023). *Peran Pendidikan dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat*. Diakses dari: <https://jurnalminang.id/peran-pendidikan-dalam-mendorong-partisipasi-politik-masyarakat/>
- Manganti, G. S. (2023). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(11), 380–389. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Mozin, S. Y., Patuti, V. I., Hasan, H., Mahmud, Z., & Sampara, M. P. (2025). Demokrasi Partisipatif dalam Pembuatan Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), 139-146.
- Nurhaliza, S. (2025). *Partisipasi Publik, Tenaga Baru Demokrasi*. Diakses dari: <https://iap2.or.id/partisipasi-publik-tenaga-baru-demokrasi/>
- PuskoMedia Indonesia. (2024). *Pentingnya Pendidikan Partisipatif: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pengambilan Keputusan Desa Sawangan Sawangan*. Diakses dari: <https://sawangan-cilacap.desa.id/pentingnya-pendidikan-partisipatif-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-akan-pengambilan-keputusan-desa-sawangan-sawangan>.
- Rustiyana, R., Andi, J., Zuhri, M., Anwar, S., & Shaddiq, S. (2025). Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik: Studi Model Co-Production di Era Smart City. *Edu Research*, 6(2), 1509-1521.